

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN DI SDN 116459 KECAMATAN TORGAMBA  
LABUHANBATU SELATAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RAHMADANI DALIMUNTHE**

**NPM : 1503100106**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Konsentrasi Administrasi Kebijakan**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

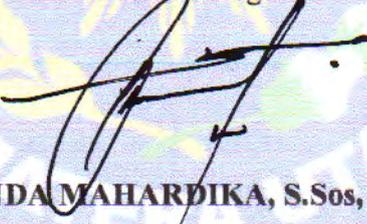
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **RAHMADANI DALIMUNTHE**  
N P M : 1503100106  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN. 116459 Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan

Medan, 24 Juni 2019

Pembimbing

  
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

Disetujui Oleh:  
Ketua Program Studi,

  
**NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN,

  
  
**Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., M.SP**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RAHMADANI DALIMUNTHE**  
N P M : 1503100106  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019  
Waktu : 08.30 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Drs. R. Kusnadi, M.AP (.....)  
PENGUJI II : Dr. Laylia Khairani, M.Si (.....)  
PENGUJI III : Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP (.....)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

  
**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**



Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

Bismillahirrahmannirahim

Dengan ini saya, **RAHMADANI DALIMUNTHE** NPM : 1503100106, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukkan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang dalam undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat atau karya jiplakan orang lain
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Juli 2019

Yang Menyatakan



**RAHMADANI DALIMUNTHE**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SDN 116459 KECAMATAN TORGAMBA LABUHANBATU SELATAN**

**Oleh Rahmadani Dalimunthe**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria yang mencakup ; Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian. Standar nasional pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menjadi kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis data kualitatif proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan di SDN 116459 belum berjalan dengan baik. Tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai dikarenakan pihak pelaksana tidak memiliki sikap disiplin dalam melakukan tugas, serta pihak pelaksana seharusnya memahami peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan agar pihak pelaksana memiliki kesadaran dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.

**Kata Kunci : Implementasi Standar Pendidikan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penelitian skripsi penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang terismewa kedua Orang tua kepada Bapak terkasih, Manahan Dalimunthe dan Ibunda tercinta Rosmaleli Harahap yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat serta perhatian yang luar biasa, doa yang selalu dipanjatkan, dukungan moril maupun materil dari awal sampai akhir perkuliahan ini. Semoga ilmu yang didapatkan selama perkuliahan menjadikan anak yang berbakti dan orang yang bermanfaat.

Serta kepada Kakak tersayang Lihanna Afrita Dalimunthe S.KM dan Abang Ichsan Dalimunthe S.E yang selalu memberi semangat dan arahan dari awal perkuliahan ini. Terimakasih buat keluarga tercinta.

2. Bapak Drs.Agussani, M,AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Rudianto, M.Ip. M.pd selaku Plt dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip. M.pd. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini.
9. Kepada seorang spesial penulis Arif Al Riduan Hasibuan S.ST yang telah banyak membantu dalam penulisan dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

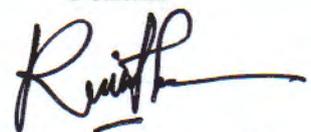
10. Untuk sahabat tercinta Caisbat sekaligus sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Dina Darayani, Gebrina Fadhillah, Inggit Dayanti Kurniawan, Nitra Eka Safitri.
11. Kepada teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesai perkuliahan yaitu, Ira Aryanti, Sindi Wiranda, Nurwahyu Yuliani, Cici Mualimah, Kamal Syahputra, Adrian Hanafi Batubara.
12. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa/i stambuk 2015 yang bergabung dalam jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penuliskan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Medan, Juli 2019**

**Penulis**



**Rahmdani Dalimunthe**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> -----	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> -----	<b>vii</b>
<b>DATAR GAMBAR</b> -----	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> -----	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah-----	1
1.2 Rumusan Masalah-----	4
1.3 Tujuan Penelitian-----	4
1.4 Manfaat Penelitian-----	5
1.5 Sistematika Penulisan-----	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> -----	<b>7</b>
2.1 Pengertian Implementasi-----	7
2.2 Pengertian Kebijakan Publik-----	9
2.3 Unsur-Unsur Kebijakan Publik-----	10
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik-----	11
2.5 Model Implementasi Kebijakan Publik-----	12
2.6 Pengertian Pendidikan-----	13
2.7 Faktor-Faktor Pendidikan-----	14
2.8 Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan-----	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> -----	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian-----	21
3.2 Krangka Konsep-----	21
3.3 Defenisi Konsep-----	22
3.4 Kategorisasi-----	23
3.5 Narasumber-----	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data-----	25
3.7 Teknik Analisis Data-----	26
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian-----	27
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian-----	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> -----	<b>31</b>
4.1 Hasil Penelitian-----	31
4.2 Pembahasan-----	43

<b>BAB V PENUTUP</b> -----	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan -----	66
5.2 Saran -----	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> -----	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Identitas Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop -----	28
Tabel 3.2	Fasilitas yang ada di Sekolah Dasar Negeri 116459 -----	30
Tabel 4.1	Jadwal Kerja Kegiatan Harian Kepala Sekolah-----	47
Tabel 4.2	Jadwal Kerja Kegiatan Mingguan Kepala Sekolah-----	48
Tabel 4.3	Jadwal Kerja Kegiatan Bulanan Kepala Sekolah-----	48
Tabel 4.4	Jadwal Kerja Kegiatan Semester Kepala Sekolah-----	49
Tabel 4.5	Jadwal Kerja Kegiatan Akhir Tahun Kepala Sekolah -----	49
Tabel 4.6	Jadwal Kerja Kegiatan Awal Tahun Kepala Sekolah-----	50

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 3.1	Kerangka Konsep -----	21
Gambar 3.2	Bagan Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop -----	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-III Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK-IV Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
- Lampiran X : SK-VII Borang Data Alumni
- Lampiran XI : Surat Izin Riset
- Lampiran XII : Surat Balasan Riset
- Lampiran XIII : Surat Selesai Melakukan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan memiliki defenisi sesuai yang terkandung dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal (1) dinyatakan; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan bernegara.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup; Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang menjadi kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia, yang memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan merupakan konsep yang utuh, menyeluruh, saling terkait dan saling

mempengaruhi. Apabila satu komponen bermasalah maka komponen yang lain akan terganggu. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam Standar Nasional Pendidikan adalah sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar keragaman jenis peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan harus tersedia. Standar jumlah buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. Adapun prasarana lahan digunakan untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Namun dalam implementasi standar nasional

pendidikan khususnya dalam sarana dan prasarana masih menjadi kendala yang belum terpecahkan khususnya di daerah terpencil seperti SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan.

SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan adalah salah satu sekolah yang ada di daerah pedalaman Labuhanbatu Selatan yang saat ini memiliki kondisi yang sangat jauh dari standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena saat ini SDN 116459 hanya memiliki sarana seperti ruang kelas yang sebagian tidak terlalu baik dikarenakan kaca jendela yang rusak dan sebagian ruang kelas tidak memiliki lemari, memiliki lahan yang tidak difasilitasi untuk menunjang pembelajaran, memiliki ruang pendidik yang bergabung dengan ruang pimpinan satuan pendidikan, serta memiliki bahan habis pakai yang didapatkan dari para pendidik. Sedangkan yang tidak dimiliki SDN 116459 seperti perpustakaan, laboratorium, ruang ibadah, ruang bengkel kerja dan sebagian sarana prasarana lainnya.

Dengan sarana dan prasarana yang saat ini ada di SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan yang sebagaimana ditetapkan. Seharusnya peraturan tersebut menjadi tolak ukur dalam setiap satuan pendidikan yang diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk terciptanya tujuan dari kebijakan tersebut harus dijalankan dengan implementasi yang baik dan benar. Namun peraturan tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kegagalan implementasi dipengaruhi oleh tidak adanya kerjasama dan tindakan dari berbagai pihak yang terlibat, pihak yang terlibat tidak efisien, pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahannya,

sehingga sampai saat ini kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan masih belum terwujud.

Dengan adanya masalah yang dihadapi terhadap standar nasional pendidikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk melihat betapa pentingnya tujuan dari suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat memperluas pengetahuan peneliti dan pembaca tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan

b. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberi ataupun menambah solusi bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan

c. Secara akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan ilmu pemerintahan khususnya jurusan ilmu administrasi negara

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II :URAIAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan Teori Implementasi, Teori Kebijakan Publik, Unsur-Unsur Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik, Model Implementasi Kebijakan Publik, Teori Pendidikan, Faktor-Faktor Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan

### BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Lokasi Penelitian, Deskripsi Ringkas Lokasi Penelitian

### BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Penyajian Data, Identitas Responden dan Analisis Data Hasil Penelitian.

### BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi tentang Simpulan dan Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Menurut etimologi kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “to implement” yang artinya mengimplementasikan, tidak hanya sekadar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma tertentu.

Menurut Syafri (2012:133) Implementasi adalah sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Pasolong (2007:57) Implementasi adalah sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh, akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat bahwa betapa pun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan dengan strategi yang benar.

Menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan, implementasi juga perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas atau tindakan yang terencana dengan strategi yang benar guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan (stakeholders). Implementasi adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan, Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcome biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek yaitu kurikulum, Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## **2.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Suaib (2015:74) Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat

Menurut Ramdhani (2017:10) Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang- bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu, sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan

Menurut Abidin (2012:19) Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang ingin dicapai yang bersifat teknis, kebijakan tetap berada pada strata strategis yang dapat dibedakan dengan sekedar suatu petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan/kegiatan/aktivitas/cara yang merupakan keputusan yang terarah,terukur yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik

untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik memang masuk dalam ranah kepentingan dengan banyak aktor yang berkepentingan didalamnya. Nilai-nilai rasional yang dikembangkan dalam analisis kebijakan publik sejauh mungkin didekatkan kepada kepentingan publik. Fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan

### **2.3 Unsur-Unsur Kebijakan Publik**

Melalui proses kebijakan , terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari struktur terdapat lima unsur kebijakan.

- a. Tujuan : Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu adanya kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur yang pertama dari suatu kebijakan
- b. Masalah : Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses pembuatan kebijakan
- c. Tuntutan : Adanya tuntutan karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka serta karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan
- d. Dampak : Dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau

dampak yang lebih besar dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan

- e. Sarana atau alat : Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut

#### **2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Aneta (2010:55) Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Menurut Indiahono (2017:143) Implementasi kebijakan publik adalah aktivitas menjalankan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintahan maupun para pihak yang ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan publik biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi

diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah aktivitas yang terdapat dalam kebijakan publik yang dijalankan dalam ranah yang senyatanya serta untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan mencapai tujuannya atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah atau para pihak kepentingan dalam sebuah kebijakan.

## **2.5 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Model implementasi kebijakan publik memiliki empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group)
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan, keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh

implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan

- d. Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri

## **2.6 Pengertian Pendidikan**

Menurut Mulyasana (2011:2) Pendidikan adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup.

Menurut Insan (1995:1) Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan

Menurut Siagian (2006:32) Pendidikan adalah keseluruhan proses teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari diri seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terencana dengan strategi dan teknik yang diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi guna pematangan kualitas hidup. Sebagai suatu proses, pendidikan dimaknai sebagai semua tindakan yang mempunyai efek pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran, dan perilaku. Dengan demikian pendidikan bukan sekadar pengajaran dalam arti kegiatan

mentransfer ilmu, teori, dan fakta-fakta akademik semata atau bukan sekadar urusan ujian, menetapkan kriteria kelulusan, serta pencetakan ijazah semata. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dari buruknya hati, akhlak dan keimanan.

## **2.7 Faktor –Faktor Pendidikan**

Menurut Hafid (2014:32) Penjabaran dari faktor-faktor tersebut dalam praktik proses pendidikan harus dilihat sebagai suatu sistem, setiap komponen atau faktor tidak dapat terpisahkan dan saling mempengaruhi.

### **a. Faktor Tujuan**

Tujuan adalah usaha pencapaian oleh peserta didik tentang hasil praktik pendidikan baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat secara luas. Jika dilihat dari aspek hirarki tujuan pendidikan yaitu:

- 1) Tujuan nasional, yaitu tujuan umum pendidikan nasional yang didalamnya terkandung rumusan kualifikasi umum, sangat ditekankan untuk ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia
- 2) Tujuan Institutional, yaitu tujuan lembaga pendidikan yang berisi tentang kualifikasi yang diharapkan diperoleh seorang anak setelah menyelesaikan studinya di lembaga pendidikan tertentu
- 3) Tujuan Kurikuler, yaitu pembelajaran dari tujuan institusional yang berisi tentang kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh terdidik setelah mengikuti program pendidikan dalam suatu bidang studi/mata pelajaran tertentu, misalnya tujuan untuk mata pelajaran sejarah dan PKN

4) Tujuan Instruksional, yaitu pengkhususan dari tujuan kurikuler

b. Faktor Pendidik

Kata pendidik adalah sesuatu yang biasanya sinonim dari kata pembimbing, pelatih, dan pengajar. Sehingga itu, kerap kali asumsi pendidik seolah-olah hanya dilimpahkan kepada guru di sekolah, sementara orang tua atau pihak lain yang sesungguhnya juga sangat menentukan proses perkembangan anak (peserta didik) belum seutuhnya dipandang sebagian yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Ada lima pihak yang memiliki peran vital sebagai pendidik yaitu ; orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat dan pemimpin agama.

c. Faktor Peserta Didik

Peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang merasa tergantung pada pendidikannya, ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibanding dengan kemampuan pendidiknya.

d. Faktor Alat Pendidikan

Alat-alat pendidikan yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang secara kongkrit dan tegas dilaksanakan, guna menjaga agar proses pendidikan berjalan dengan lancar dan berhasil, misalnya metode, pendekatan, perangkat keras yang digunakan untuk tujuan pendidikan yang dilakukan.

### 1) Macam-macam Alat Pendidikan

Ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan yang dimaksud berupa, pembuatan pendidik ( biasa disebut software), mencakup nasehat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Serta alat bantu (dalam hal ini biasa disebut dengan istilah hardware) mencakup, meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis/spidol, buku, peta, OHP, dan sebagainya.

### 2) Dasar Pertimbangan Penggunaan Alat

Mengenai aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan atau menggunakan alat tersebut baik dalam hal tindakan maupun refleksi pemakaian instrumen, maka hal yang sangat diperhatikan adalah pribadi yang menggunakannya, karena itu bukan sekedar teknis semata akan tetapi juga berhubungan dengan suasana kebatinan dan kepribadian pendidik.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pendidik yaitu; tujuan yang ingin dicapai, orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan, efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tindakan melahirkan efek tambahan atau merugikan bagi peserta didik.

#### e. Faktor Lingkungan

Anak atau peserta didik tidak bisa dipisahkan oleh lingkungannya karena secara kodrati sebagai manusia pasti akan selalu melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Dalam kondisi inilah anak akan melakukan proses pendidikan sosial. Secara umum melihat ada tiga lingkungan belajar anak yang berpengaruh yaitu, alam keluarga (lingkungan keluarga), alam perguruan (lingkungan sekolah), dan alam pergerakan pemuda (lingkungan masyarakat).

## **2.8 Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan**

Menurut peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 kriteria, yaitu :

### **a. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, menengah dan nonformal dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan juga ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sedangkan standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

#### b. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar isi kesetaraan pendidikan program paket.

#### c. Standar Proses Pendidikan

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, reaktivitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik

#### d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud harus melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

#### e. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki imprasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, ruang kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang diatur dan berkelanjutan.

#### f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu:

- 1) Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan
- 2) Standar pengelolaan oleh pemerintahan daerah
- 3) Standar pengelolaan oleh pemerintah

#### g. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah standar yang mengatur komponen yang besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam satu tahun yang terdiri atas:

- 1) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

- 2) Biaya personal sebagaimana dimaksudkan pada diatas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 3) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, saran, dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

#### h. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
- 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- 3) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah

## BAB III

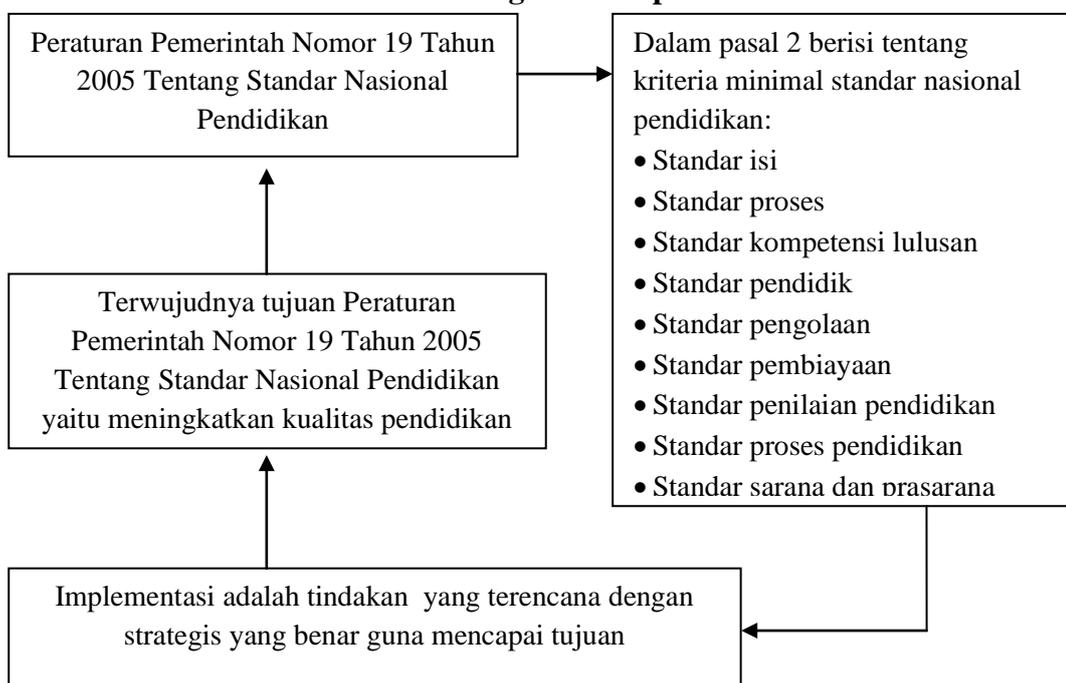
### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Menurut Nazir (2005:54) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/identifikasi masalah penelitian.

#### 3.2 Kerangka konsep

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konsep**



### 3.3 Defenisi konsep

Menurut Nawawi (2003:43) mengemukakan konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial

Adapun konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi adalah aktivitas atau tindakan yang terencana dengan strategi yang benar guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan (stakeholders). Implementasi adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan
- b. Kebijakan adalah suatu tindakan/kegiatan/aktivitas/cara yang merupakan keputusan yang terarah, terukur yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.
- c. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan

implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu

- d. Pendidikan adalah suatu proses yang terencana dengan strategi dan teknik yang diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi guna pematangan kualitas hidup. Sebagai suatu proses, pendidikan dimaknai sebagai semua tindakan yang mempunyai efek pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran, dan perilaku.
- e. Standar Nasional Pendidikan menurut peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
- f. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian mendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Untuk analisis dari variabel tersebut.

- a. Adanya unsur pelaksana pihak satuan pendidikan untuk mencapai tujuan
- b. Adanya komunikasi pihak satuan pendidikan terhadap instansi terkait
- c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan
- d. Adanya pengawasan satuan pendidikan untuk mencapai tujuan

### 3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan “orang yang memberikan sebuah informasi”

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah

- a. Kepala Sekolah SD Negeri 116459

Nama : Zaidar  
Umur : 55 Tahun  
Pendidikan : SPG

- b. Guru PNS SD Negeri 116459

Nama : Nurhaidah Harahap  
Umur : 34 Tahun  
Pendidikan : S1

- c. Guru Honorer SD Negeri 116459

Nama : Lili Nurindah Sari  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : S1

d. Guru Honorer SD N 116459

Nama : Mariana Sagala

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : S1

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data agar penelitian dapat diselesaikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Adapun cara untuk mendapat data primer sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan yang dilakukan secara struktur antara dua orang atau lebih secara langsung dalam mengenali informasi dengan jalan tatap muka apa yang diperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan melalui sumber yang kompeten. Dengan proses komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan)

## 2) Observasi

Menurut Riduwan (2004:104) Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan terhadap suatu fenomena.

- b. Data Sekunder, yaitu menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan evaluasi data relatif lebih sedikit dibanding dengan pengumpulan data primer

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah suatu data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang penelitian. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang menggambarkan keadaan kenyataan dilapangan. Yang terpenting dalam analisis data kualitatif menurut Miles (1992:16) bahwa analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

- a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari

catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

- b. Penyajian Data, yaitu suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang padu dan mudah diraih.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, singkatnya makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya kekokohnya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya

### **3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan dan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

SD Negeri 116459 Aek Torop Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan berdiri tahun 1980, dibangun diatas tanah ukuran 10.000 m/p yang berada dilokasi Perkebunan Inti Rakyat. SD Negeri 116459 Aek Torop ini merupakan sekolah yang tertua di Dusun Aek Torop sehingga SD Negeri 116459 ini menjadi sekolah

bagi anak beberapa kampung yang ada disekitarnya walaupun dengan jarak cukup jauh. Sejak SD Negeri 116459 Aek Torop ini dibangun tahun 1980 hanya sekali dilakukan pembenahan sekolah yakni pada tahun 2012, bangunan yang pertama hanya terbuat dari dinding papan dan berlantai semen, namun setelah pembenahan dilakukan gedung sekolah sudah permanen dan berlantai keramik.

**Tabel 3.1**

**Identitas Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop**

NPSN	10205114
Status	Negeri
Akreditasi	C
Kurikulum	KTSP
Bentuk Pendidikan	SD
Status Kepemilikan	Pemerintah Pusat
SK pendirian Sekolah	-
Tanggal SK Pendirian	1986-01-01
SK Izin Operasional	-
Tanggal SK Izin Operasional	1910-01-01

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

### 3.9.1 Visi Misi Sekolah

#### a. Visi Sekolah

Mewujudkan tamatan yang cerdas dan 100% melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang asri

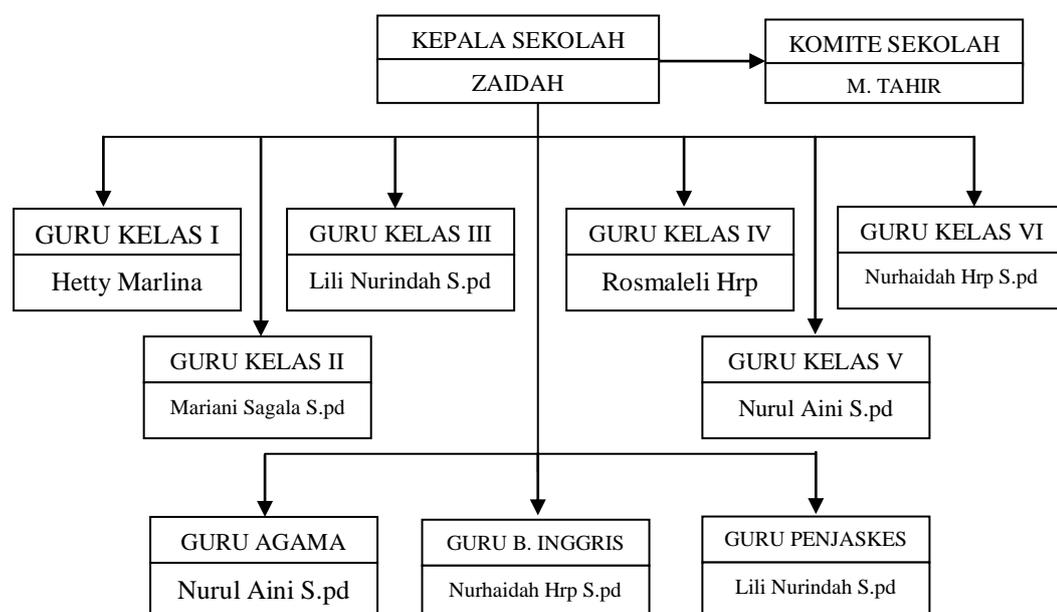
#### b. Misi Sekolah

- 1) Membudayakan disiplin bagi seluruh warga sekolah melalui tertib administrasi dan proses pembelajaran.
- 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan
- 3) Memanfaatkan sekolah sebagai sarana belajar yang nyaman melalui program perundangan dan penghijauan sekolah

### 3.9.2 Bagan Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop

**Gambar 3.2**

**Bagan Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop**



Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

### 3.9.3 Fasilitas Sekolah SDN 116459

**Tabel 3.2**

**Fasilitas yang ada di Sekolah Dasar Negeri 116459**

<b>Fasilitas Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
Ruang Kelas Belajar	6
Ruang Guru	1
UKS	-
Perpustakaan	-
Laboratorium	-
Kantin	-
Kantor Kepala Sekolah	1
Kamar mandi	1
Laptop	1

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian penulis sebagai berikut :

##### **4.1.1 Adanya unsur pelaksana satuan pendidik untuk mencapai tujuan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.00 wib dengan kepala sekolah Ibu Zaidar (55 tahun) di SD N116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa unsur pelaksana satuan pendidik dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kepala sekolah agar tercapainya tujuan tersebut. Sebagai kepala sekolah yang menjadi unsur pelaksana dalam satuan pendidikan tersebut beliau mengetahui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 walaupun tidak sepenuhnya mengetahui isi peraturan tersebut sehingga kurang berkompeten dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut sehingga dalam bertindak untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (PNS) Ibu Nurhaidah Harahap (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa unsur pelaksana satuan pendidik dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kepala sekolah, dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut tidak begitu diketahui oleh unsur pelaksana satuan pendidik dan tidak begitu diketahui

oleh pegawai pendidik. Menurut beliau kepala sekolah belum melakukan tindakan untuk mengimplentasikan kebijakan tersebut sebagai unsur pelaksana satuan pendidikan dikarenakan unsur pelaksana atau kepala sekolah tersebut masih tidak memperhatikan keadaan sekolah dalam keadaan apapun, terlihat dari kehadiran kepala sekolah yang tidak disiplin menurut beliau. Dan unsur pelaksana juga tidak melakukan tindakan yang telah ditetapkan seperti adanya kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan semester, kegiatan akhir tahun dan kegiatan awal tahun. Sehingga unsur pelaksana belum berkompeten dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Lili Nurindah Sari (27 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa unsur pelaksana satuan pendidik dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kepala sekolah, namun peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut tidak begitu diketahui sehingga dalam mengimplementasikannya masih belum tercapai, dengan hal itu unsur pelaksana kurang bertindak sesuai dengan kebijakan tersebut, menurut beliau unsur pelaksana atau kepala sekolah kurang bertindak dalam mencapai tujuan tersebut seperti ketidakpedulian beliau terhadap sekolah, guru dan siswa. Sehingga kepala sekolah kurang mengetahui kebutuhan yang diperlukan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Mariana Sagala (34 tahun) di

SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa unsur pelaksana satuan pendidik dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kepala sekolah, namun unsur pelaksana dan guru tersebut kurang mengetahui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut dikarenakan kurang sosialisasinya mengenai kebijakan tersebut, menurut beliau unsur pelaksana atau kepala sekolah masih sangat kurang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan, hal itu dikarenakan kepala sekolah yang kurang disiplin dan bertanggung jawab terhadap pegawai pengajar dan kebutuhan sekolah.

Dengan demikian kesimpulan bahwa unsur pelaksana satuan pendidik Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kepala sekolah, namun pegawai pengajar dan unsur pelaksana satuan pendidik terhadap kebijakan tersebut masih kurang memahami dan mengerti dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut. Sehingga unsur pelaksana belum melakukan tindakan yang sesuai dalam kebijakan tersebut seperti unsur pelaksana itu yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Hal itu terjadi dikarenakan unsur pelaksana yang tidak disiplin, tidak peduli terhadap pegawai pengajar dan sekolah. Hal itulah yang menjadi faktor belum tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

#### **4.1.2 Adanya komunikasi pihak satuan pendidik terhadap instansi terkait**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.00 wib dengan kepala sekolah Ibu Zaidar (55 tahun) di SD N116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa pihak satuan pendidik melakukan komunikasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan, Koordinator Wilayah, PT Perkebunan Nusantara III Medan, dan Komite Sekolah dan dampak yang diharapkan adalah agar sarana dan prasarana dalam pembelajaran nyaman dan terpenuhi. Adapun komunikasi yang dilakukan dengan cara melakukan permohonan terhadap instansi terkait lalu menunggu surat balasan dari instansi tersebut. Karena letak sekolah yang berdekatan dengan beberapa perusahaan negara atau swasta maka pihak satuan sekolah berhak melakukan komunikasi dengan perusahaan tersebut agar membantu dalam melengkapi kebutuhan sekolah. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan komunikasi adalah proses yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan waktu yang tidak sesuai dengan seharusnya sehingga menghambat komunikasi. Namun pihak satuan sekolah tetap melakukan tindakan agar tercapai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (PNS) Ibu Nurhaidah Harahap (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa pihak satuan pendidik melakukan komunikasi dengan instansi seperti Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan, Koordinator Wilayah, PT Perkebunan Nusantara III Medan, Komite Sekolah, komunikasi yang dilakukan sudah cukup

baik, hal itu dapat dilihat dari kebutuhan proses pembelajaran yang cukup terpenuhi. Adapun komunikasi yang dilakukan pihak satuan pendidik yaitu melakukan permohonan kepada instansi untuk membantu memenuhi kekurangan yang dibutuhkan dalam proses pengajaran, pihak satuan pendidik banyak melakukan komunikasi tidak hanya kepada kedinasan namun juga kepada perusahaan yang berdiri disekitar kawasan sekolah tersebut. Dengan demikian banyak peralatan sekolah yang diperoleh dari perusahaan seperti kursi murid, sebagian papan tulis dan sarana dan prasarana lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Lili Nurindah Sari (27 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa pihak satuan pendidik melakukan komunikasi dengan instansi terkait seperti, Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan, Koordinator Wilayah, PT Perkebunan Nusantara III Medan, dan Komite Sekolah. Pihak satuan pendidik melakukan komunikasi dengan harapan agar sarana dan prasarana dapat terpenuhi, maka komunikasi yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik yaitu melakukan surat permohonan yang menyatakan adanya kekurangan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, dan setelah itu pihak satuan menunggu surat balasan dari instansi terkait. Komunikasi yang dilakukan sangat bermanfaat bagi pihak sekolah karena membantu memenuhi kebutuhan sekolah seperti sarana dan prasarana sekolah yang diberikan oleh instansi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Mariana Sagala (34 tahun) di

SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa pihak satuan pendidik melakukan komunikasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan, Koordinator Wilayah, PT Perkebunan Nusantara III Medan, Komite Sekolah, adapun komunikasi yang dilakukan pihak satuan sekolah dengan instansi terkait dengan cara mengirimkan surat permohonan untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian menunggu keputusan dari pihak instansi tersebut, namun kendala yang ditemukan dalam komunikasi dengan instansi tersebut adalah waktu yang cukup lama untuk terwujud, tidak hanya dengan kedinasan pihak satuan pendidik melakukan komunikasi tetapi juga dengan beberapa perusahaan yang berada dikawasan sekolah dengan prosedur yang sama, sehingga banyak kebutuhan sekolah yang tidak berasal dari kedinasan melainkan dari perusahaan disekitar sekolah.

Dengan demikian kesimpulan bahwa pihak pelaksana satuan pendidik melakukan komunikasi dengan berbagai instansi tidak hanya dengan dinas pendidikan namun juga dengan perusahaan yang berada disekitar kawasan tersebut. Komunikasi dilakukan dengan harapan dapat terpenuhinya kekurangan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah, komunikasi yang dilakukan pun dengan cara mengirimkan surat permohonan pihak satuan pendidik kepada instansi tersebut kemudian menunggu keputusan dari instansi tersebut, dapat dilihat bahwa komunikasi tersebut sangat jelas dan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pihak satuan pendidik. Seperti buku yang diberikan kedinasan, ruang belajar, dan peralatan lainnya dan yang tidak

didapatkan dari kedinasan dipenuhi oleh perusahaan yang ada disekitar kawasan tersebut.

#### **4.1.3 Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.00 wib dengan kepala sekolah Ibu Zaidar (55 tahun) di SD N116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan seperti meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, buku pembejaran dan perlengkapan kelas lainnya. Dan sarana dan prasarana yang digunakan sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun tidak semua sarana dan prasarana dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku yang tidak dipakai dalam proses pembelajaran sehingga buku tersebut hanya pajangan saja. Adapun alat peraga yang dimiliki sekolah tidak semua bisa digunakan oleh satuan pendidik, hal itu dikarenakan tidak mengertinya dalam menggunakan sarana dan prasarana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (PNS) Ibu Nurhaidah Harahap (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya. Semua sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sudah cukup

mendukung dalam mencapai tujuan, dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah sebagian bisa digunakan pihak sekolah namun ada yang kurang diketahui pihak sekolah seperti penggunaan alat peraga dan tidak semua buku yang dimiliki sekolah bisa digunakan oleh satuan sekolah sehingga dampaknya buku tersebut hanya menjadi hiasan saja dan banyak perlengkapan yang seharusnya sudah wajib diganti namun masih digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Lili Nurindah Sari (27 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya. Sarana prasarana tersebut sangat mendukung dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan walaupun sarana dan prasarana belum begitu lengkap dari yang seharusnya, sarana prasarana yang ada cukup memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan pihak pendidik. Namun sebagian sarana dan prasarana kurang berfungsi dengan kebutuhan seperti alat peraga yang kurang dipahami, sarana yang sudah wajib diganti, p3k yang tidak berfungsi lagi dan alat lainnya. Adapun cara yang digunakan dalam mengatasi ketidaktahuan terhadap alat peraga yaitu dengan banyak membaca buku petunjuk alat peraga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Mariana Sagala (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan meja murid, kursi murid, meja guru, kursi

guru, lemari, papan tulis, alat peraga, dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya walaupun masih tidak begitu lengkap. Sarana prasarana yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan proses pembelajaran dan alat tersebut cukup dapat digunakan sesuai dengan fungsi namun masih ada yang tidak begitu berfungsi tapi sangat dibutuhkan oleh pihak satuan pendidik seperti buku yang tidak digunakan p3k yang tidak dimanfaatkan dan alat kesehatan lainnya.

Dengan demikian kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada dimiliki pihak satuan pendidik cukup terpenuhi dan mendukung dalam proses pembelajaran, namun sarana prasarana tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh satuan pendidik seperti alat peraga yang kurang dipahami oleh satuan pendidik, alat yang dimiliki pihak satuan pendidik namun tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan seperti banyaknya buku yang tidak digunakan dalam proses pembelajaran, dan tidak memanfaatkan alat yang sangat dibutuhkan seperti tidak memperhatikan alat p3k dan kesehatan lainnya yang seharusnya sangat diwajibkan ada disetiap satuan pendidik. Dengan demikian sarana dan prasarana yang ada sudah cukup mendukung namun tidak dilakukan pihak satuan pendidik tidak melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana sesuai dengan kewajiban yang ada di peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut

#### **4.1.4 Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.00 wib dengan kepala sekolah Ibu Zaidar (55 tahun) di SD N116459

Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah pengawas sekolah dan pengawasan tersebut dilakukan secara bertahap atau berkelanjutan adapun yang diawasi seperti sarana prasarana sekolah, sistem pembelajaran serta mengawasi kesiapan para pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seperti bahan yang diajarkan kepada siswa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas sekolah yaitu dengan cara tidak memberi tau pihak sekolah kapan pengawas akan datang ke sekolah tersebut. Maka dari itu pihak sekolah harus mengikuti sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (PNS) Ibu Nurhaidah Harahap (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan adalah pengawas sekolah dan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan cukup baik. Adapun yang diawasi oleh pihak pengawas yaitu sistem administrasi sekolah yang berjalan dengan baik atau tidak, keadaan sekolah seperti kebutuhan yang diperlukan sekolah, kedisiplinan kepala sekolah dan pengajar disekolah serta memperhatikan kemampuan dan kesiapan para pengajar untuk melakukan proses pembelajaran. Cara pengawas melakukan pengawasan dengan cara yang mendadak tanpa pemberitahuan kepada pihak sekolah karena hal itu pihak satuan pendidik harus mengikuti peraturan yang ada, namun masalah yang sering terjadi adalah ketika pengawas melakukan

pengawasan kepala sekolah tidak berada disekolah sehingga berdampak negatif terhadap sekolah bahkan pengajar

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Lili Nurindah Sari (27 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan adalah pengawas sekolah. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara bertahap dan waktu yang tidak ditentukan hal itu yang membuat pihak satuan pendidik harus mempersiapkan dan mengikuti kebijakan yang berjalan. Hal yang diperhatikan dalam pengawasan adalah kedisiplinan kepala sekolah dan para pengajar, keadaan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, perawatan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah serta kemampuan dan kesiapan para pengajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun walaupun demikian kepala sekolah masih saja tidak disiplin sehingga para pengajar tidak begitu mengikuti ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Mariana Sagala (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan adalah pengawas sekolah yang sejauh ini pengawasan tersebut sudah berjalan cukup baik dikarenakan pengawasan yang dilakukan secara bertahap dan waktu yang tidak diketahui oleh pihak sekolah. Adapun yang diawasi pihak pengawas adalah sistem administrasi sekolah dan administrasi para pengajar seperti kelengkapan surat yang harus diperbaharui

dalam waktu tertentu, kebutuhan kelengkapan sekolah dan keadaan sekolah, serta melihat kompetensi para pengajar seperti proses pemberian materi dan kesiapan materi yang akan disampaikan kepada siswa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian kesimpulan bahwa yang melakukan pengawasan adalah pengawas sekolah yang sudah berjalan cukup baik dengan melakukan pengawasan yang bertahap dan berkelanjutan dengan waktu yang tidak diketahui oleh setiap satuan pendidik sehingga berdampak kepada sekolah agar selalu mengikuti peraturan yang ada, adapun yang menjadi aspek pengawasan pihak pengawas sekolah seperti keadaan sekolah, kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan sekolah, sistem administrasi sekolah seperti data sekolah, administrasi siswa seperti data pendaftaran dan lainnya, serta administrasi para pendidik seperti surat yang berhubungan dengan profesi pengajar yang harus dilengkapi atau diperbaharui sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian maka pihak sekolah akan mengikuti peraturan yang ada namun pada kenyataannya pimpinan sekolah masih tidak disiplin seperti kehadiran yang tidak teratur, administrasi yang diperlambat serta tidak melakukan tindakan perawatan terhadap sekolah. Maka walaupun demikian sistem pengawasan tetap masih tidak memberikan dampak yang baik bagi sekolah dikarenakan tidak disiplinnya unsur pelaksana.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Adanya unsur pelaksana satuan pendidik untuk mencapai tujuan**

Menurut Syafri (2012:133) Implementasi adalah sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Setiawan (2004:39) Impelementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan, implementasi juga perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Pasolong (2007:57) Implementasi adalah sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat bahwa betapa pun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan dengan strategi yang benar.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas atau tindakan yang terencana dengan menggunakan sumber daya dengan strategi yang benar guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Adapun tindakan yang dilakukan bukan hanya mengimplementasikan isi kebijakan namun juga melakukan tindakan pengawasan dan tindakan evaluasi. Dengan demikian penulis menyatakan asumsi pada teori tersebut bahwa implementasi itu harus dilakukan dengan tindakan yang tepat dengan sumber daya dan adanya kerjasama dalam mencapai tujuan

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa unsur pelaksana satuan pendidik untuk mencapai tujuan belum mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adapun hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor penyebab dari unsur pelaksana satuan pendidik yang tidak menguasai isi kebijakan tersebut serta memiliki sikap yang tidak disiplin dalam melaksanakan aktivitas mencapai tujuan, karena memahami isi kebijakan dan memiliki sikap disiplin sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Dan dalam proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan, agar semua kegiatan terlaksanakan maka unsur pelaksana harus mengetahui serta memahami dari adanya kebijakan tersebut agar dalam mengimplementasikan kebijakan tetap berada pada ketentuan tujuan yang telah ditetapkan. Karena hal itu dalam menyiapkan, menentukan,

melaksanakan serta mengendalikan kebijakan diperlukan sikap disiplin terhadap unsur pelaksana, sikap disiplin sangat mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan hal itu karena sikap disiplin mampu menciptakan unsur pelaksana yang jelas dan tepat dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dengan kepala sekolah Ibu Zaidar (55 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa unsur pelaksana satuan pendidik dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kepala sekolah agar tercapainya tujuan tersebut. Sebagai kepala sekolah yang menjadi unsur pelaksana dalam satuan pendidikan tersebut beliau mengetahui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 walaupun tidak sepenuhnya mengetahui isi peraturan tersebut sehingga kurang berkompeten dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut sehingga dalam bertindak untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Dan berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib Ibu Nurhaida Harahap (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa unsur pelaksana satuan pendidik dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kepala sekolah, dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut tidak begitu diketahui. Menurut beliau kepala sekolah sangat belum melakukan tindakan untuk

mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai unsur pelaksana satuan pendidikan dikarenakan unsur pelaksana atau kepala sekolah tersebut masih tidak memperhatikan keadaan sekolah dalam keadaan apapun, terlihat dari kehadiran kepala sekolah yang tidak disiplin menurut beliau. Dan unsur pelaksana juga tidak melakukan tindakan yang telah ditetapkan seperti adanya kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan semester, kegiatan akhir tahun dan kegiatan awal tahun. Sehingga unsur pelaksana belum berkompeten dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian unsur pelaksana satuan pendidik untuk mencapai tujuan tidak berjalan dengan baik, hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan teori yang ada, seperti yang ada terdapat pada teori bahwa implementasi yaitu penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran tertentu. Namun yang terjadi pada unsur pelaksana dalam mencapai tujuan sangat tidak sejalan dengan teori tersebut, seperti pihak unsur pelaksana yang tidak sepenuhnya memahami isi kebijakan tersebut sehingga sulit dalam melakukan tindakan yang telah ditetapkan, adanya tindakan tidak disiplin oleh unsur pelaksana dalam melakukan tindakan yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut, sikap tidak disiplin unsur pelaksana dapat terlihat dari jadwal kehadiran unsur pelaksana yang tidak teratur dan tidak disiplin dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan administrasi pegawai sehingga dalam administrasi

pegawai mengalami keterlambatan dalam urusan kedinasan, serta sikap tidak peduli terhadap kebutuhan sekolah dan tidak memperhatikan yang telah dimiliki satuan pendidikan sehingga unsur pelaksana pendidik tidak begitu mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Padahal begitu banyak aktivitas atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh unsur pelaksana seperti kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan semester, kegiatan akhir tahun serta kegiatan awal tahun. Namun kegiatan tersebut hanya menjadi pajangan dan tidak dilaksanakan oleh unsur pelaksana. Karena hal itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada sangat sulit untuk diimplementasikan oleh unsur pelaksana.

**Tabel 4.1**  
**Jadwal Kerja Kegiatan Harian Kepala Sekolah**

I	Kegiatan Harian	Hari					
		SN	SL	RB	KM	JM	SB
A	Memeriksa daftar hadir guru, teknis kependidikan dan tenaga T.U						
B	Mengatur dan memeriksa kegiatan 7K di sekolah						
C	Memeriksa program pengajaran dan persiapan lainnya						
D	Menyelesaikan surat-surat, angka kredit guru, menerima tamu dan menyelesaikan tugas kantor						
E	Melaksanakan supervisi kegiatan KBM						
F	Menagatasi hambatan terhadap berlangsungnya PBM						
G	Mengatasi hambatan yang terjadi						
H	Memeriksa segala sesuatu menjelang sekolah usai						

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

**Tabel 4.2**  
**Jadwal Kerja Kegiatan Mingguan Kepala Sekolah**

II	Kegiatan Mingguan	Mingguan			
		I	II	III	IV
A	Melaksanakan upacara bendera hari senin dan hari-hari besar				
B	Melaksanakan senam kesegaran jasmani				
C	Memeriksa agenda dan menyelesaikan surat menyurat				
D	Mengadakan rapat mingguan untuk menjadi bahan rencana kegiatan mingguan				
E	Memeriksa keuangan sekolah				
F	Mengatur penyediaan keperluan perlengkapan kantor/sekolah				

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

**Tabel 4.3**  
**Jadwal Kerja Kegiatan Bulanan Kepala Sekolah**

III	Kegiatan Bulanan	Bulanan													
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
A	Pada awal bulan dilakukan kegiatan rutin antara lain :														
	1.Melaksanakan kegiatan setoran gaji pegawai/guru, lap bulanan, rencana keperluan perlengkapan kantor/sekolah														
	2.Melaksanakan pemeriksaan umum antara lain														
	a.Buku kelas daftar hadir guru dan T.U														
	b.Kumpulan program pengajaran														
	c.Pencapaian kurikulum														
	d.Program perbaikan														
B	Pada akhir bulan dilakukan kegiatan														
	1.Penutupan buku														
	2.Pertanggung jawaban keuangan														
	3.Evaluasi penggunaan alat sekolah														

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

**Tabel 4.4**  
**Jadwal Kerja Kegiatan Semester Kepala Sekolah**

IV	Kegiatan Semester	Semester I						Semester II						
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
A	Menyelenggarakan perbaikan alat sekolah													
B	pengisian buku induk siswa													
C	Persiapan pelaksanaan ulangan semester													
D	Evaluasi BK Osis, UKS, Ekstrakurikuler													
E	Pelaksanaan kegiatan akhir semester													
	1. Daftar kelas													
	2. Kumpulan nilai													
	3. Catatan siswa perhatian khusus													
	4. Pengisian buku nilai semester													
	5. Pembagian buku lap hasil belajar													
	6. Pemanggilan orang tua siswa													

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

**Tabel 4.5**  
**Jadwal Kerja Kegiatan Akhir Tahun Kepala Sekolah**

V	Kegiatan Akhir Tahun	Pelaksanaan Kegiatan				
		Hari	Tgl/bln	Wkt	Plksn	Ket
A	Penutupan buku keuangan					
B	Melakukan ulangan umum ujian					
C	Kenaikan kelas dan kelulusan					
D	Evaluasi program dan menyusun program selanjutnya					
F	Penyusunan rencana perbaikan					
G	Pembuatan lap akhir tahun pelajaran					
H	Mempersiapkan kegiatan penerimaan siswa baru					

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

**Tabel 4.6**  
**Jadwal Kerja Kegiatan Awal Tahun Kepala Sekolah**

V	Kegiatan Awal Tahun	Pelaksanaan Kegiatan				
		Hari	Tgl/bln	Wkt	Plksn	Ket
A	Merencanakan kebutuhan guru					
B	Pembagian tugas mengajar					
C	Menyusun program pengajaran, jadwal pelajaran dan kalender pendidikan					
D	Menyusun kebutuhan pelajaran					
E	Menyusun perlengkapan alat pelajaran dan bahan pelajaran					
F	Mengadakan rapat guru					

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 116459 Aek Torop 2018/2019

#### **4.2.2 Adanya komunikasi pihak satuan pendidik terhadap instansi terkait**

Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Indiahono (2017:143) Implementasi kebijakan publik adalah aktivitas menjalankan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintahan maupun para pihak yang ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan publik biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan.

Menurut Subarsono (2006:90) Model implementasi kebijakan publik memiliki empat variabel, yaitu:

Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group)

- a. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan, keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah.
- b. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan
- c. Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah aktivitas yang terdapat dalam kebijakan publik yang dijalankan dalam ranah yang senyatanya serta untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan mencapai tujuannya atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah atau para pihak kepentingan dalam sebuah kebijakan dengan melakukan tindakan yang

menggunakan komunikasi yang baik seperti adanya hubungan antara unsur pelaksana dengan instansi terkait dan hubungan tersebut berkelanjutan, pentingnya komunikasi pada implementasi kebijakan tentu saja untuk mempermudah koordinasi integrasi dalam implementasi suatu kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif, semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun maka semakin mudah kebijakan akan diimplementasikan, sumber daya yang baik seperti memiliki sumber daya manusia yang mampu melakukan dan menjalankan tindakan sesuai dengan yang dibutuhkan seperti memiliki unsur pelaksana yang sesuai dengan tujuan dan fungsi, serta sumber daya finansial yaitu kecukupan modal yang dimiliki dalam menjalankan tindakan implementasi agar berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia maupun finansial juga merupakan hal yang penting dalam tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Seperti setiap organisasi atau instansi harus memiliki sumber daya manusia agar dapat menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan dan dalam menjalankan aktivitas tersebut juga membutuhkan sumber daya finansial agar kebutuhan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat terpenuhi, disposisi yang baik seperti sikap yang dimiliki oleh unsur pelaksana haruslah memiliki sikap yang mengarah kepada nilai yang baik seperti jujur, komitmen tinggi, disiplin dan lainnya, karena mengimplementasikan kebijakan tidak akan berhasil jika para pihak pelaksana tidak memiliki sikap tersebut. Dan struktur birokrasi yang baik seperti adanya

struktur yang jelas dan struktur yang berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi agar setiap unsur pelaksana dapat menjalankan fungsi dengan baik. Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan hal ini dikarenakan agar unsur pelaksana dapat menjalankan dan berkerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang telah ditetapkan bersama. Jika suatu organisasi tidak memiliki struktur yang jelas maka akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut untuk mencapai tujuan karena tidak akan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga mengganggu segala proses yang diharapkan berjalan. Dengan demikian penulis menyatakan asumsi pada teori tersebut bahwa implementasi itu akan berhasil jika dilakukan dengan tindakan atau aktivitas yang menggunakan komunikasi yang baik, memanfaatkan sumber daya yang ada, disposisi yang baik, serta adanya struktur organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga sebuah kebijakan akan berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan secara bersama.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan pihak satuan pendidik terhadap instansi terkait sudah cukup berjalan dengan baik, namun tidak melakukan komunikasi yang secara berlanjutan, karena pihak satuan pendidik melakukan komunikasi dengan berbagai instansi terkait, namun bentuk komunikasi yang dilakukan tidak berkelanjutan hanya dilakukan saat adanya keperluan terhadap sesuatu. Dalam implementasi yang baik agar tercapainya tujuan yang diinginkan harus melakukan beberapa variabel yang salah satunya adalah dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang baik sangat

dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan komunikasi tersebut juga harus berkelanjutan agar dapat membantu dalam implementasi kebijakan, karena jika unsur pelaksana melakukan komunikasi yang baik maka akan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara kerjasama dengan instansi tertentu untuk membantu dalam mengimplementasi kebijakan, adapun sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidik dalam mencapai tujuan cukup baik seperti sumber daya manusia yang sudah cukup berjalan dengan baik, tetapi masih memiliki sumber daya manusia yang tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sehingga cukup menghambat dalam kegiatan administrasi, seperti tata usaha yang tidak melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi. Adapun dalam disposisi yang dimiliki satuan pendidik tidak mendukung dalam tercapainya tujuan seperti tidak adanya sikap dengan nilai yang baik yang dimiliki oleh satuan pendidik seperti sikap tidak disiplin, tidak jujur dan tidak berkomitmen tinggi untuk menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan, serta unsur pelaksana tidak membentuk struktur birokrasi yang baik, hal ini dikarenakan tidak adanya pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap struktur yang telah ditetapkan bersama walaupun satuan pendidik memiliki struktur birokrasi.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (PNS) Ibu Nurhaidah Harahap (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa pihak satuan pendidik melakukan komunikasi dengan instansi seperti Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan, Koordinator Wilayah, PT Perkebunan Nusantara III Medan, Komite

Sekolah, komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik, hal itu dapat dilihat dari kebutuhan proses pembelajaran yang cukup terpenuhi. Adapun komunikasi yang dilakukan pihak satuan pendidik yaitu melakukan permohonan kepada instansi untuk membantu memenuhi kekurangan yang dibutuhkan dalam proses pengajaran, pihak satuan pendidik banyak melakukan komunikasi tidak hanya kepada kedinasan namun juga kepada perusahaan yang berdiri disekitar kawasan sekolah tersebut walaupun komunikasi yang dilakukan tidak secara berkelanjutan. Dengan demikian banyak peralatan sekolah yang diperoleh dari perusahaan seperti kursi murid, sebagian papan tulis dan sarana dan prasarana lainnya.

Dengan demikian komunikasi yang dilakukan pihak satuan pendidik dalam mencapai tujuan dengan instansi terkait cukup berjalan dengan baik, hal itu dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara tersebut yaitu unsur pelaksana satuan pendidik melakukan komunikasi tidak hanya dengan instansi ke dinas pendidikan saja namun juga dengan pihak instansi lainnya seperti perusahaan yang berada dikawasan sekolah tersebut dengan harapan dapat membantu pihak satuan pendidik dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut namun komunikasi yang dilakukan oleh unsur pelaksana pihak satuan pendidik tidak bersifat berkelanjutan hanya melakukan komunikasi ketika diperlukan dalam membantu atau memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh satuan pendidik, adapun dengan sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia cukup berjalan dengan baik, namun masih memiliki kekurangan dalam sumber daya manusia seperti adanya pegawai yang tidak memiliki kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga

dalam disposisi pun tidak pihak satuan pelaksana tidak cukup baik karena adanya sikap yang tidak mendukung dalam menjalankan tindakan untuk mencapai tujuan sehingga dalam struktur organisasi pun tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak memiliki struktur yang jelas dan struktur organisasi yang tidak berjalan dengan fungsi yang telah ditetapkan secara bersama hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang hanya tinggal pajangan saja.

#### **4.2.3 Adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan**

Menurut Pasolong (2007:57) Implementasi adalah sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat bahwa betapa pun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan dengan strategi yang benar.

Menurut Abidin (2004:45) Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari struktur terdapat lima unsur kebijakan.

- a. Tujuan : Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu adanya kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur yang pertama dari suatu kebijakan

- b. Masalah : Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses pembuatan kebijakan
- c. Tuntutan : Adanya tuntutan karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka serta karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan
- d. Dampak : Dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan
- e. Sarana atau alat : Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam implementasi tidak hanya melakukan tindakan atau perluasan aktivitas dalam ranah senyatanya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat) namun dalam implementasi membutuhkan beberapa aspek seperti adanya kelengkapan sarana dan prasarana dalam menjalankan implementasi tersebut, dan dalam kebijakan publik memiliki unsur yaitu adanya tujuan yang diharapkan dari dibuatnya suatu kebijakan seperti tujuan adanya tujuan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yaitu menciptakan pendidikan yang layak dan agar terciptanya generasi yang memiliki

intelektual, kemudian adanya masalah seperti tingkat pendidikan yang cukup rendah dan kurangnya fasilitas dalam proses pembelajaran, kemudian adanya tuntutan seperti perlunya pendidikan yang baik dalam bernegara agar memiliki penerus bangsa yang sesuai dengan harapan, kemudian adanya dampak dari terciptanya peraturan kebijakan tersebut seperti tingkat pendidikan yang cukup baik, dan adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung kebijakan yang ada. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam implelementasi, karena dengan adanya sarana prasarana atau alat yang layak dan digunakan sesuai dengan fungsi akan membantu sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan dan dalam implementasinya pemerintah harus menjadikan sarana dan prasarana adalah hal yang sangat dibutuhkan. Jika sarana dan prasarana kurang dalam penyediaannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan, karena kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana prasarana yang dibutuhkan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan cukup terpenuhi dan mendukung dalam proses pembelajaran, namun sarana dan prasarana tersebut tidak sepenuhnya dipahami dan digunakan oleh satuan pendidik, sehingga alat yang dimiliki pihak satuan pendidik tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik seperti buku yang tidak dipergunakan, P3K yang tidak dipergunakan dan alat peraga yang tidak dipahami dalam penggunaannya sehingga sarana dan prasarana yang ada tidak sepenuhnya mendukung dalam mencapai tujuan. Sarana

pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti gedung, ruangan belajar, alat atau media pembelajaran, meja, kursi dan sebagainya sedangkan sarana yang dimaksud dengan tidak secara langsung mendukung proses pembelajaran seperti halaman, kebun atau taman sekolah maupun jalan menuju ke sekolah, sarana dan prasarana bukan hanya membantu dalam proses pembelajaran tetapi juga membantu dalam meningkatkan kualitas yang dimiliki siswa seperti jika satuan sekolah memiliki sarana komputer dan laboratorium maka siswa berkesempatan belajar hal tersebut sehingga mampu dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorir) Ibu Lili Nurindah Sari (27 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya. Sarana prasarana tersebut sangat mendukung dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan walaupun sarana dan prasarana belum begitu lengkap dari yang seharusnya, sarana prasarana yang ada cukup memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan pihak pendidik. Namun sebagian sarana dan prasarana kurang berfungsi dengan kebutuhan seperti alat peraga yang kurang dipahami, sarana yang sudah wajib diganti, P3K yang tidak berfungsi lagi dan alat lainnya

sehingga satuan pendidik tidak begitu melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dimiliki. Adapun cara yang digunakan dalam mengatasi ketidaktahuan terhadap alat peraga yaitu dengan banyak membaca buku petunjuk alat peraga tersebut.

Dan berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Mariana Sagala (34 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya walaupun masih tidak begitu lengkap. Sarana prasarana yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan proses pembelajaran dan alat tersebut cukup dapat digunakan sesuai dengan fungsi namun masih ada yang tidak begitu berfungsi tapi sangat dibutuhkan oleh pihak satuan pendidik seperti buku yang tidak digunakan P3K yang tidak dimanfaatkan dan alat kesehatan lainnya.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana sangat penting dalam implementasi sebuah kebijakan, karena dapat membantu berjalannya sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sarana dan prasarana menjadi aspek penting dan menjadi urusan yang harus dipenuhi dan dapat dipahami dalam menggunakannya oleh unsur pelaksana kebijakan. Dan sarana prasarana yang digunakan pihak satuan pendidik sudah cukup mendukung dalam mencapai tujuan, namun tidak semua sarana dan prasarana yang dimiliki pihak satuan pendidik digunakan dengan fungsinya seperti buku yang tidak dipergunakan untuk proses pembelajaran, alat peraga yang tidak dipahami untuk

mendukung proses pembelajaran, serta P3K yang tidak digunakan untuk kegiatan kesehatan, serta pihak satuan pendidik tidak melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh satuan pendidik, sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidik tidak sepenuhnya berfungsi dan mendukung dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

#### **4.2.4 Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan**

Menurut Aneta (2010:55) Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Menurut Dunn (2000:24) menganjurkan bahwa setiap tahapan kebijakan publik termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa dan

pengawasan. Analisa yang dimaksud tidak indentik dengan evaluasi kerana dari tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan sudah dilakukan analisis.

Menurut Sumardi (2005:79) dalam mengimplementasikan sesuatu kegiatan, terdapat tiga unsur yaitu :

- a. Terdapat program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Memiliki target grup dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- c. Terdapat unsur pelaksana disebut implementor yang dilakukan baik dari organisasi atau perorangan yang dapat dan bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam kebijakan publik tidak hanya melakukan tindakan dan peluasan aktivitas yang menggunakan sumber daya dalam mengimplementasikannya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan aktor, atau organisasi (publik atau privat) namun dalam tahapan kebijakan publik juga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Adapun pengawasan yang dilakukan agar kebijakan tersebut tidak terjadinya aktivitas yang tidak dibutuhkan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut, pengawasan bertujuan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dalam mengerjakan dan perintah yang diajukan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan penyimpangan

tindakan atas tujuan yang akan dicapai serta pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan agar efektif dan efisien. Maka dari itu pengawasan dapat melihat sejauhmana pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun fungsi pengawasan yaitu sebagai penilai apakah setiap unit telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab setiap pelaksana, sebagai penilai apakah surat atau laporan yang dapat sudah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat, sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif, sebagai penilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif. Pengawasan terbagi dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh suatu instansi yang terkait dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal yaitu seperti unit organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah cukup berjalan dengan baik. Adapun yang pengawasan pada unsur pelaksana adalah pengawas internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu instansi terkait seperti pengawas sekolah dengan melakukan penyelusuran ke sekolah dan melakukan berbagai pengawasan seperti pengawasan administrasi seperti administrasi siswa, pegawai pengajar, dan administrasi sekolah, pengawasan terhadap sarana dan

prasarana seperti kelengkapan dan kebutuhan sarana dan prasarana yang ada disatuan pendidik seperti kelengkapan dalam proses pembelajaran dan melihat pemeliharaan terhadap sarana prasarana atau alat yang dimiliki satuan pendidik serta pengawasan terhadap kesiapan pengajar untuk melakukan proses pembelajaran seperti adanya bahan pembelajaran lengkap yang dimiliki oleh pegawai pengajar yaitu adanya buku pembelajaran dan adanya panduan dalam melakukan pembelajaran namun pengawasan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak begitu berkompeten dikarenakan waktu untuk melakukan pengawasan tidak begitu teratur sehingga pihak satuan pendidik tidak mengetahui kapan pengawasan tersebut. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait tidak terlalu berdampak baik dengan pihak satuan pendidik hal ini dikarenakan pengawas tidak begitu mengetahui proses kegiatan yang sesuai dengan ketetapan atau kegiatan yang menyimpang dari ketetapan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada pukul 10.15 wib dengan guru kelas (honorar) Ibu Lili Nurindah Sari (27 tahun) di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan adalah pengawas sekolah. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara bertahap dan waktu yang tidak ditentukan hal itu yang membuat pihak satuan pendidik harus mempersiapkan dan mengikuti kebijakan yang berjalan. Hal yang diperhatikan dalam pengawasan adalah kedisiplinan kepala sekolah dan para pengajar, keadaan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, perawatan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah serta kemampuan

dan kesiapan para pengajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun walaupun demikian kepala sekolah masih saja tidak disiplin sehingga para pengajar tidak begitu mengikuti ketetapan yang ada.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan sangat penting dalam tahapan kebijakan publik, hal ini dikarenakan pengawasan sebagai batasan bagi unsur pelaksana agar tetap berada pada ranah yang mendukung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga tindakan dan aktivitas yang dilakukan dalam implementasi tetap pada kesepakatan yang telah ditetapkan dan mengetahui proses jalannya kebijakan tersebut. Oleh karena itu dalam pengawasan yang dilakukan pada satuan pendidik sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan pengawasan tersebut sudah dilakukan secara berkelanjutan namun dengan waktu yang tidak diketahui oleh satuan pendidik, dan pengawasan yang dilakukan pengawas sekolah sudah cukup lengkap seperti melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan unsur pelaksana, kelengkapan administrasi sekolah, murid serta para pengajar, kebutuhan sarana dan prasarana dan kesiapan para pengajar untuk melakukan proses pembelajaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dan disajikan oleh penulis mengenai permasalahan bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kategorisasi yang menjadi acuan atau tolak ukur dalam bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut sehingga dapat diketahui mengapa kebijakan tersebut sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melakukan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, pihak satuan pendidik tidak mengetahui isi kebijakan dengan baik sehingga kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dengan tidak mengetahui isi kebijakan tersebut sehingga pihak satuan pendidik tidak melakukan tindakan yang mendukung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak satuan pendidik tidak memiliki sikap disiplin dalam melakukan tindakan, unsur pelaksana dan pihak satuan pendidik lainnya juga tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sehingga

menyebabkan struktur organisasi yang tidak berjalan dengan baik, adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik seperti komunikasi cukup berjalan dengan baik namun komunikasi yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik tidak bersifat kelanjutan sehingga tidak terjalin hubungan yang baik dalam mencapai tujuan, komunikasi yang dilakukan hanya saat membutuhkan yang bersifat bantuan kepada pihak satuan pendidik.

Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan membutuhkan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan, sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidik cukup baik sehingga cukup mendukung dalam proses pembelajaran yang dilakukan pihak satuan namun pihak satuan pendidik tidak melakukan tindakan dalam melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dimiliki sehingga sarana dan prasarana tidak begitu dimanfaatkan fungsinya dan menyebabkan kerusakan dalam waktu yang singkat. Implementasi Kebijakan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan juga memerlukan tindakan pengawasan dalam mencapai tujuan, pengawasan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh pihak pengawas berjalan dengan cukup baik seperti melakukan pengawasan yang berjalan dengan waktu tertentu namun waktu tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga pengawasan yang dilakukan tidak begitu berdampak baik dalam mencapai tujuan dari kebijakan peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan di SDN 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SD N 116459 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, hendaknya kepala sekolah sebagai pihak unsur pelaksana harus mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan tersebut agar dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan.
2. Sebagai pihak unsur pelaksana seharusnya kepala sekolah harus memiliki sikap yang bernilai baik seperti, disiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab dan berkomitmen tinggi dalam melakukan tindakan sebagai unsur pelaksana untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan.
3. Seharusnya pihak unsur pelaksana dan para pengajar melakukan kerjasama yang baik agar dapat melakukan tindakan yang mempermudah dalam mengimplementasi, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan para pengajar.
4. Hendaknya pihak unsur pelaksana satuan pendidik harus melakukan komunikasi yang baik dan berkelanjutan terhadap instansi internal maupun eksternal.
5. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya pihak unsur pelaksana melakukan tindakan untuk memenuhi sarana dan prasarana, serta melakukan tindakan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan

pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh satuan pendidik.

6. Seharusnya sebagai pihak unsur pelaksana melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan agar mengetahui apakah terjadi sebuah penyimpangan dalam mengimplementasikannya
7. Kemudian jika telah dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja sebaiknya melakukan tindakan perbaikan terhadap kinerja, program atau sarana dan prasarana agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan mempermudah implementasi sebuah kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Fattah, Nanang. 2003. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . 2003. *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Hafid, Anwar. 2014. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Instrans Publishing
- <https://media.neliti.com/media/publications/97581-ID-implementasi-kebijakan-program-penanggul.pdf>
- Indiahono, Dwyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jakarta: Gava Media
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suaib, Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Carpulis
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Rahmadani Dalimunthe  
Tempat ,Tanggal Lahir : Aek Torop , 2 April 1997  
Alamat : Emplasmen Aek Torop  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Manahan Dalimunthe  
Nama Ibu : Rosmaleli Harahap

### Jenjang Pendidikan

1. SD NEGERI 116459 Aek Torop  
Tahun 2003 - 2009
2. SMP NEGERI 1 Torgamba  
Tahun 2009 - 2012
3. MAS PLUS AL-ULUM MEDAN  
Tahun 2012 - 2015

## HASIL WAWANCARA

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SDN 116459

Nama : Zaidar

Jabatan : Kepala Sekolah

- a. Adanya unsur pelaksana satuan pendidik untuk mencapai tujuan
  1. Siapakah unsur pelaksana pihak satuan pendidik dalam mengimplementasikan kebijakan.  
Jawaban : Yang menjadi unsur pelaksana kebijakan tersebut adalah kepala sekolah serta guru- guru yang ada di sekolah ini
  2. Apakah unsur pelaksana menguasai isi kebijakan tersebut  
Jawaban : Tahu kebijakan tersebut, namun tidak sepenuhnya dikuasai.
  3. Apakah isi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh unsur pelaksana  
Jawaban : Dapat dilaksanakan namun tidak sepenuhnya.
  4. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana dalam mencapai tujuan  
Jawaban : Ada, seperti waktu dalam pengurusan keperluan sekolah.
  
- b. Adanya komunikasi pihak satuan pendidik terhadap instansi terkait.
  1. Dengan siapa saja pihak satuan pendidik berkomunikasi untuk mencapai tujuan  
Jawaban : Melakukan komunikasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, Koordinator Wilayah, Komite Sekolah serta dengan perusahaan seperti PT. Perkebunan Nusantara III.
  2. Dampak apa yang diharapkan dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik

Jawaban : Agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada instansi tersebut.

3. Kendala seperti apa yang dihadapi dalam berkomunikasi terhadap instansi terkait

Jawaban : Kendalanya seperti proses yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga menghambat komunikasi.

4. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Tetap melakukan komunikasi kepada instansi kepada instansi terkait.

- c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

1. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan

Jawaban : Seperti meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, buku pembelajaran, dan perlengkapan lainnya.

2. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan sudah mendukung untuk mencapai tujuan

Jawaban : Sudah cukup mendukung kebutuhan .

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menggunakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan

Jawaban : Ada seperti alat peraga yang terkadang tidak tahu cara menggunakannya.

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Dengan membaca buku petunjuk yang ada

- d. Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Siapa yang melakukan pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan

Jawaban : Diawasi oleh Pengawas Sekolah (PS)

2. Apakah pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik

Jawaban : Sudah cukup baik. pengawasan dilakukan secara bertahap atau berkelanjutan ,dan yang diawasi oleh pengawasan seperti sarana sekolah, sistem pembelajaran, kesiapan para pengajar.

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan

Jawaban : Seperti jadwal yang tidak sesuai dalam melakukan pengawasan.

4. Bagaimana tindakan cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Harus menjalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan

## HASIL WAWANCARA

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SDN 116459

Nama : Nurhadidah Harahap

Jabatan : Guru Kelas (PNS)

- a. Adanya unsur pelaksana satuan pendidik untuk mencapai tujuan
  1. Siapakah unsur pelaksana pihak satuan pendidik dalam mengimplementasikan kebijakan.  
Jawaban : Kepala sekolah sebagai unsur pelaksana
  2. Apakah unsur pelaksana menguasai isi kebijakan tersebut  
Jawaban : Tidak begitu diketahui,
  3. Apakah isi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh unsur pelaksana  
Jawaban : Bisa namun belum sepenuhnya melakukan tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan.
  4. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana dalam mencapai tujuan  
Jawaban : Ada, seperti kepala sekolah yang kurang memperhatikan sekolah dan kehadiran kepala sekolah yang tidak disiplin.
  
- b. Adanya komunikasi pihak satuan pendidik terhadap instansi terkait.
  1. Dengan siapa saja pihak satuan pendidik berkomunikasi untuk mencapai tujuan  
Jawaban : Berkomunikasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, Koordinator Wilayah, Komite Sekolah serta dengan perusahaan seperti PT. Perkebunan Nusantara III.
  2. Dampak apa yang diharapkan dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik

Jawaban : Agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada instansi tersebut untuk membantu memenuhi kekurangan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran

3. Kendala seperti apa yang dihadapi dalam berkomunikasi terhadap instansi terkait

Jawaban : Kendalanya seperti proses yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga menghambat komunikasi.

4. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Tetap melakukan komunikasi kepada instansi kepada instansi terkait.

- c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

1. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan

Jawaban : Seperti meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, buku pembelajaran, dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya.

2. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan sudah mendukung untuk mencapai tujuan

Jawaban : Sudah cukup mendukung kebutuhan untuk mencapai tujuan.

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menggunakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan

Jawaban : Ada seperti penggunaan alat peraga yang kurang tahu cara menggunakannya, tidak semua buku digunakan, sarana yang seharusnya diganti.

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Dengan membaca buku petunjuk yang ada.

d. Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Siapa yang melakukan pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan

Jawaban : Yang mengawasi adalah Pengawas Sekolah (PS)

2. Apakah pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik

Jawaban : Sudah cukup berjalan baik. pengawasan dilakukan secara bertahap atau berkelanjutan dan mendadak ,dan yang diawasi oleh pengawasan seperti sistem administrasi sekolah , sarana sekolah, sistem pembelajaran, kesiapan para pengajar.

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan

Jawaban : Seperti jadwal yang mendadak dalam melakukan pengawasan.

4. Bagaimana tindakan cara mengatasi kendala tersebut,

Jawaban : Harus menjalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan

## HASIL WAWANCARA

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SDN 116459

Nama : Mariani Sagala

Jabatan : Guru Kelas (Honorar)

- a. Adanya unsur pelaksana satuan pendidik untuk mencapai tujuan
  1. Siapakah unsur pelaksana pihak satuan pendidik dalam mengimplementasikan kebijakan.  
Jawaban : Kepala sekolah sebagai unsur pelaksana
  2. Apakah unsur pelaksana menguasai isi kebijakan tersebut  
Jawaban : Kurang mengetahui kebijakan
  3. Apakah isi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh unsur pelaksana  
Jawaban : Masih kurang dalam implementasinya
  4. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana dalam mencapai tujuan  
Jawaban : Ada, seperti kepala sekolah yang kurang disiplin dan bertanggung jawab terhadap pegawai dan kebutuhan sekolah
  
- b. Adanya komunikasi pihak satuan pendidik terhadap instansi terkait.
  1. Dengan siapa saja pihak satuan pendidik berkomunikasi untuk mencapai tujuan  
Jawaban : Berkomunikasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, Koordinator Wilayah, Komite Sekolah serta dengan perusahaan seperti PT. Perkebunan Nusantara III.
  2. Dampak apa yang diharapkan dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik

Jawaban : Agar sarana dan prasarana dapat terpenuhi

3. Kendala seperti apa yang dihadapi dalam berkomunikasi terhadap instansi terkait

Jawaban : Waktu yang cukup lama untuk dapat keputusannya

4. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Tetap melakukan komunikasi kepada instansi kepada instansi terkait.

- c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

1. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan

Jawaban : Seperti meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, buku pembelajaran, dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya walaupun tidak begitu lengkap

2. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan sudah mendukung untuk mencapai tujuan

Jawaban : Sudah cukup memenuhi kebutuhan proses pembelajaran.

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menggunakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan

Jawaban : Ada seperti penggunaan alat peraga yang kurang tahu cara menggunakannya, tidak semua buku digunakan, sarana yang tidak berfungsi namun sangat dibutuhkan oleh satuan pendidik

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Dengan membaca buku petunjuk yang ada.

- d. Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Siapa yang melakukan pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan

Jawaban : Yang mengawasi adalah Pengawas Sekolah (PS)

2. Apakah pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik

Jawaban : Sudah cukup berjalan baik. Pengawasan dilakukan secara bertahap dan waktu tidak diketahui oleh pihak satuan pendidik, dan yang diawasi oleh pengawasan seperti sistem administrasi sekolah, kebutuhan kelengkapan sekolah, sistem pembelajaran, kompetensi para pengajar.

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan

Jawaban : Seperti jadwal yang mendadak dalam melakukan pengawasan.

4. Bagaimana tindakan cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Harus menjalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan

## HASIL WAWANCARA

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SDN 116459

Nama : Lili Nurindah Sari (27 Tahun)

Jabatan : Guru Kelas (Honorar)

- a. Adanya unsur pelaksana satuan pendidik untuk mencapai tujuan
  1. Siapakah unsur pelaksana pihak satuan pendidik dalam mengimplementasikan kebijakan.  
Jawaban : Yang menjadi unsur pelaksana adalah kepala sekolah
  2. Apakah unsur pelaksana menguasai isi kebijakan tersebut  
Jawaban : Kurang mengetahui isi kebijakan
  3. Apakah isi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh unsur pelaksana  
Jawaban : Masih kurang dalam tindakan implementasinya
  4. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana dalam mencapai tujuan  
Jawaban : Ada, seperti kepala sekolah yang kurang disiplin dan kurang peduli terhadap sekolah, guru dan siswa
  
- b. Adanya komunikasi pihak satuan pendidik terhadap instansi terkait.
  1. Dengan siapa saja pihak satuan pendidik berkomunikasi untuk mencapai tujuan  
Jawaban : Melakukan komunikasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Koordinator Wilayah, Komite Sekolah serta dengan perusahaan seperti PT. Perkebunan Nusantara III.

2. Dampak apa yang diharapkan dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik

Jawaban : Dengan harapan sarana dan prasarana dapat terpenuhi, dengan melakukan surat permohonan kepada instansi tersebut.

3. Kendala seperti apa yang dihadapi dalam berkomunikasi terhadap instansi terkait

Jawaban : Menunggu waktu terhadap hasil surat tersebut.

4. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Tetap melakukan komunikasi kepada instansi kepada instansi terkait.

c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

1. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan

Jawaban : Seperti meja murid, kursi murid, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, alat peraga, buku pembelajaran, dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya walaupun tidak begitu lengkap

2. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan sudah mendukung untuk mencapai tujuan

Jawaban : Sangat mendukung dalam proses pembelajaran, walaupun tidak begitu lengkap

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menggunakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan

Jawaban : Ada seperti penggunaan alat peraga yang kurang tahu cara menggunakannya, tidak semua buku digunakan, sarana yang tidak berfungsi namun sangat dibutuhkan oleh satuan pendidik

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Dengan banyak membaca buku petunjuk yang ada.

d. Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Siapa yang melakukan pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan

Jawaban : Yang mengawasi adalah Pengawas Sekolah (PS)

2. Apakah pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik

Jawaban : Sudah cukup berjalan baik. Pengawasan dilakukan secara bertahap dan waktu tidak diketahui oleh pihak satuan pendidik, dan yang diawasi oleh pengawasan seperti sistem administrasi sekolah, kebutuhan kelengkapan sekolah, sistem pembelajaran yang berlaku, kompetensi para pengajar, perawatan dalam penggunaan sarana dan prasarana

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan

Jawaban : Seperti jadwal yang mendadak dalam melakukan pengawasan.

4. Bagaimana tindakan cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : Harus menjalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
 menjawab surat ini agar disebutkan  
 or dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 19 Nov 2018.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rahmadani Dalimuntia  
 N P M : 1503100106  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3.59

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116453 Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ack Batu Kecamatan Torgamba.	
3	Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru di SDN 116453 Kecamatan Torgamba.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon, /

Medan, tgl. ....20....

Ketua,  
*[Signature]*

*[Signature]*  
 (Rahmadani Dalimuntia)  
 Pembimbing *[Signature]*



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.030/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 19 November 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RAHMADANI DALIMUNTHE**  
N P M : 1503100106  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN DI SD N 116459 KECAMATAN TORGAMBA,  
LABUHAN BATU SELATAN**

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal : 19 November 2019.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 02 Rabiul Akhir 1440 H  
10 Desember 2018 M

Dekan  
  
  
**Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 371/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 29 Jumadil Akhir 1440 H  
06 Maret 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Sekolah SD Negeri 116459**  
**Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan**  
di-  
Tempat.

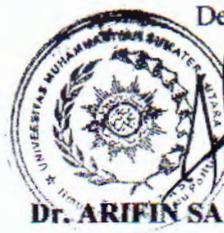
Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RAHMADANI DALIMUNTHE**  
N P M : 1503100106  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN DI SD N 116459 KECAMATAN TORGAMBA,  
LABUHAN BATU SELATAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI NO 116459 AEK TOROP**  
**KECAMATAN TORGAMBA**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 422/ 282/SDN/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SDN No 116459 Aek Torop, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

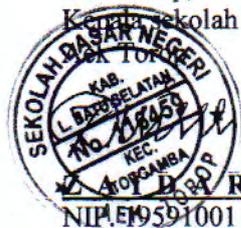
Nama Kepala Sekolah : ZAIDAR  
NIP : 19591001 197909 2003  
Jabatan : Kepala Sekolah SDN No. 116459 Aek Torop  
Alamat : Aek Torop

Benar bahwa Nama yang tertera dibawah ini Melakukan Riset ke sekolah SDN 116459 Aek Torop yaitu :

Nama : RAHMADANI DALIMUNTHE  
NPM : 1503100106  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII ( Delapan ) Tahun Akademik 2018 / 2019  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN DI SDN 116459 KECAMATAN TORGAMBA,  
LABUHANBATU SELATAN

Demikian Surat keterangan ini kami perbuat dengan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Torop, 11 April 2019  
Kepala Sekolah SDN No. 116459



NIP. 19591001 197909 2003



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
SEKOLAH DASAR NO 116459 AEK TOROP  
KECAMATAN TORGAMBA  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Alamat : jalinsum KM. 17 Pinang Awan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Z Aidar  
NIP : 19591001 197901 2 002  
Jabatan : Kepala SD 116459 Aek Torop  
Tempat Tugas : SDN 116459 Aek Torop

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmadhani Dalimunthe  
NPM : 1503100106  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII ( delapan )  
Tahun Akademik : 2018 / 2019

Benar telah melaksanakan riset di SDN 116459 pada tanggal 09 April 2019 sampai dengan 20 April 2019 dengan judul skripsi " Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan di SD Negeri 116459 Aek Torop Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuahnbatu Selatan "

Demikian Surat Keterangan saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Torop, 21 April 2019

Kepala SDN 116459 Aek Torop

Zaidar  
NIP. 19591001 197901 2 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Enggak Cerdas at Terpenteja*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 5 Januari ..... 2019.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rahmadani Dalimunthe  
 N P M : 1503100106  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.030/SK/II.3/UMSU-03/F/2018.. tanggal 19 November 2018 .. dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SDA 116459 KECAMATAN TORGAMBA LABUHANBATU SELATAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Ananda Mahardika S. sos, M.SP)

Pemohon,

(Rahmadani Dalimunthe)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 021/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019  
W a k t u : 14.00 WIB s/d. selesai  
Tempat : Ruang LAB. & R. 301-C FISIP UMSU  
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	CINTHA TRI HAIDJATI	1503100140	IDA MARTINELLI, S.H.,M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMBERHENTIAN PEGAWAI DI KANTOR RADIO REPUBLIK INDONESIA
2	RAHMADANI DALIMUNTHE	1503100106	R. KUSNADI, Drs.,M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDART NASIONAL PENDIDIKAN DI SD N 116459 KECAMATAN TORGAMBA, LABUHAN BATU SELATAN
3	NICKEN HAFIZAH SIREGAR	1503100086	MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP.,H.	Drs. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D., H.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN FERMUSYAWARATAN DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BARGOTOPONG JAE, HALONGONAN, PADANG LAWAS UTARA
4	FATIHA RAHMI	1503100069	SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.,Ph.D.	Dr. LEYLIA KHAIRANI.	EFEKTIVITAS PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (PTP2WKSS) DI KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III MEDAN DENAI
5	PUTRA WIJAYA	1503100127	NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 DI DESA BATU ANAM KECAMATAN RAHUNING

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H

09 Januari 2019 M



a.n. Dekan  
Wakil Dekan-I

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : *Rahmadani Dalimunthe*  
 N P M : *1503100106*  
 Jurusan : *Ilmu Administrasi Negara*  
 Judul Skripsi : *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SDN 116453 Kecamatan Torgamba Kabupaten Batu Selatan.*

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	<i>25/nov 2018</i>	<i>Pendahuluan atau latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat.</i>	<i>f</i>
2.	<i>27/nov 2018</i>	<i>Bab II. Uraian Teoritis</i>	<i>f</i>
3.	<i>30/nov 2018</i>	<i>Revisi Bab II.</i>	<i>f</i>
4.	<i>5/Des 2018</i>	<i>Revisi Bab II. dan Masuk ke bab III Metodologi penelitian.</i>	<i>f</i>
5.	<i>5/Jan 2019</i>	<i>Acc Seminar proposal</i>	<i>f</i>
6.	<i>15/Mai</i>	<i>Draf wawancara.</i>	<i>f</i>
7.	<i>17/juni 2019</i>	<i>Hasil penelitian dan pembahasan.</i>	<i>f</i>
8.	<i>20/juni 2019</i>	<i>Bab V. Simpulan dan Saran.</i>	<i>f</i>
9.	<i>24/juni 2019</i>	<i>Acc Sidang Skripsi</i>	<i>f</i>

Medan, 18 Juli .....2019...

Dekan,

*[Signature]*  
 Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Pd

Ketua Program Studi,

*[Signature]*  
 Naki Khairah S.Pd, M.Pd

Pembimbing ke : **I.**

*[Signature]*  
 Amanda Mahardika



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 29 Juli 2019.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Rahmadani Dalimuntje  
N P M : 1503100106  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat rumah : Villa Mukara Johor II Blok C no.9  
Telp : 081212513457

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Asli.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Asli.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Pemohon,  
  
(Rahmadani Dalimuntje)

Disetujui oleh ;

Medan, .....20.....

Medan, .....20.....

Dekan,

a.n.Rektor,  
Wakil Rektor - I

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



**UMSU**  
Unggut | Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 622/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : **Ilmu Administrasi Publik**  
Hari, Tanggal : **Rabu, 21 Agustus 2019**  
Waktu : **08.30 Wib s.d. selesai**  
Tempat : **Ruang LAB. FISIP UMSU**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	INDAH MUTIA PUTRI	1503100014	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS PERENCANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK PAKAM
2	INDAH ZAIRANI	1503100015	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	PENGARUH DIKLAT BIMTEK E-KINERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI
3	RAHMADANI DALIMUNTHE	1503100106	Drs. R. KUSNADI, M.AP	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SD N 116459 KECAMATAN TORGAMBA, LABUHAN BATU SELATAN
4	NADIA YUNITA	1503100086	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si.	STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR
5	YOLANDA	1503100060	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si.	STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI BERBASIS SYARIAH DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SABANG

Notulis Sidang :

1.

Medan, 15 Dzulhijjah 1440 H  
16 Agustus 2019 M

Panitia Ujian

Ditetapkan oleh :  
Rektor  
Wakil Rektor I  
  
Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,  
  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris  
  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom